



Desentralisasi dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal yang Berkelanjutan

Decentralization and Government Innovation: Building Sustainable Local Government Models

¹⁾ Citra Rosika, ²⁾ Aldri Frinaldi S, ³⁾ Lince Magriasti

^{1,2,3} Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Email: ¹⁾ mapcitra19@gmail.com, ²⁾ aldri@fis.unp.ac.id, ³⁾ lincemagriasti@fis.unp.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Citra Rosika

DOI:

ABSTRAK

Desentralisasi pemerintahan adalah proses yang memberikan pemerintah lokal lebih banyak otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan peluang bagi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan lokal yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara desentralisasi pemerintahan dan inovasi pemerintah dalam upaya membangun model pemerintahan lokal yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review yang mengkaji konsep desentralisasi, inovasi pemerintah, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Data dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara desentralisasi dan inovasi pemerintah, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pemerintahan dapat memberikan pemerintah lokal lebih banyak kewenangan dan fleksibilitas dalam merancang program-program inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat, kerjasama dan kemitraan, serta penggunaan teknologi dan inovasi adalah faktor-faktor kunci dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Namun, keterbatasan sumber daya, tantangan sosial, dan perubahan iklim juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang peran desentralisasi dalam membangun model pemerintahan lokal yang berkelanjutan dan menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Implikasi praktis termasuk pentingnya memperkuat kapasitas pemerintah lokal, mempromosikan partisipasi masyarakat, dan mencari solusi inovatif untuk tantangan berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik, pemerintah lokal dapat memainkan peran yang penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata kunci: Desentralisasi, Inovasi Pemerintah, Pemerintahan Lokal

ABSTRACT

The process of decentralizing government allows local governments greater control over how resources are managed and decisions are made. This opens doors for innovative government operations and long-term local development initiatives. To create a sustainable local government model, this research attempts to investigate the connection between government innovation and decentralization. A review of the literature is the study methodology, and it looks at local sustainable development, innovation in government, and decentralization. Data were evaluated to determine the variables affecting how decentralization and government innovation interact, as well as the opportunities and problems that are new in this setting. The study's findings demonstrate how decentralization of governance can provide local governments greater power and freedom to

create creative policies that promote sustainable development. Achieving sustainable goals requires a combination of innovative and technological approaches, partnerships and active community participation. Nevertheless, there are still barriers to be addressed, such as scarce resources, societal issues, and climate change. This study emphasizes the value of innovation in the administration of public affairs and sheds light on the role that decentralization plays in creating local governance models that are sustainable. The practical consequences encompass the significance of fortifying the capabilities of local government, encouraging community involvement, and devising inventive resolutions for sustainable predicaments. Local governments have a significant role to play in attaining sustainable development at the local level

Keywords: *Decentralization, Government Innovation, Local Government*

PENDAHULUAN

Kebijakan berada di tangan pemerintah daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Desentralisasi. Desentralisasi telah menjadi salah satu isu kunci dalam diskusi mengenai tata kelola pemerintahan di berbagai negara di seluruh dunia. Konsep ini, yang melibatkan transfer kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal, telah menjadi landasan penting dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Desentralisasi tidak hanya memiliki implikasi politik, tetapi juga dampak besar pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu elemen kunci dalam pembahasan desentralisasi adalah bagaimana pemerintah lokal dapat menggabungkan inovasi dalam model pemerintahan mereka untuk memastikan berkelanjutan.

Desentralisasi telah menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal (Saragih, 2016). Globalisasi, perubahan iklim, migrasi penduduk, dan masalah sosial ekonomi yang kompleks telah menimbulkan tuntutan yang lebih besar terhadap pemerintah lokal untuk menyediakan layanan yang efisien, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan (Hermawanto & Anggraini, 2020). Dalam hal ini, inovasi menjadi kunci untuk menjawab tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa pemerintahan lokal dapat memenuhi harapan masyarakat dengan cara yang lebih baik. Seluruh daerah di Indonesia telah memiliki peraturan untuk daerahnya masing-masing seperti tata kelola pemerintah yang meliputi perpajakan dan pendapatan daerah, penyelenggaraan inovasi daerah seperti pariwisata, penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dsb (Azis, 2021).

Salah satu penerapan desentralisasi adalah inovasi daerah yang bertujuan memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing Daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Inovasi pemerintah adalah proses di mana pemerintah mengadopsi dan menerapkan praktik-praktik baru atau berbeda dalam penyelenggaraan layanan publik dan pengambilan keputusan. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi informasi, restrukturisasi organisasi, pengembangan kebijakan yang inovatif, dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan. Ketika inovasi diterapkan dengan baik dalam konteks desentralisasi, pemerintah lokal dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

Beberapa daerah seperti Provinsi Jawa Tengah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah yang mengatur tentang Bentuk inovasi daerah dapat berupa produk, layanan, proses, dan sistem. Kemudian Kabupaten Semarang dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan inovasi di daerah. Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah melalui inovasi daerah. Serta Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah. Setiap perangkat daerah wajib memiliki paling sedikit satu inovasi daerah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi inovasi daerah yang berhasil. Kriteria inovasi daerah meliputi kebaruan, manfaat, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

Pentingnya inovasi dalam konteks desentralisasi juga terkait dengan upaya untuk membangun model pemerintahan lokal yang berkelanjutan. Pemerintahan lokal yang berkelanjutan adalah pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup aspek-aspek seperti pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusi sosial. Dalam beberapa kasus, pemerintah lokal yang sukses telah mengadopsi inovasi dalam berbagai bidang, seperti transportasi berkelanjutan, manajemen limbah, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, inovasi telah membantu mereka untuk lebih efektif dalam mengelola sumber daya, mengurangi dampak lingkungan negatif, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Inovasi pemerintah lokal untuk menanggulangi permasalahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan melibatkan kolaborasi antara beberapa stakeholders di internal dan eksternal organisasi (masyarakat, swasta, data developer). Oleh karena itu model inovasi kolaboratif dalam tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah dan publiknya. Inovasi dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan

Pejabat publik sering kali mendapat kritik keras dari masyarakat atau kelompok lain. Karena mereka bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, mereka harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab moral dan profesionalisme. Hal ini telah berkembang menjadi kerentanan kritis dalam birokrasi pelayanan publik. Meski banyak terjadi pertukaran dinamis antara Negara (pemerintah) dan masyarakat umum, namun masyarakat masih menilai pelayanan belum maksimal. Hal ini juga disebabkan oleh adanya sistem politik yang berkuasa di banding pelayanan publik. Sehingga inovasi muncul untuk mengatasi pemikiran masyarakat. Tanpa adanya inovasi, pemerintah dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena tidak dapat menjawab kebutuhannya (Digidesa.id, 2022). Pemerintah mengubah cara penyampaian dan pelayanan agar masyarakat merasa puas dan kebutuhan mereka terpenuhi. Penelitian Zulkifli (Zulkifli, 2020) Membuktikan bahwa inovasi mempengaruhi kinerja dari pemerintah daerah yang berimplikasi pada kualitas pelayanan. Ia menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat inovasi maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai.

Namun, tantangan besar juga terkait dengan mengintegrasikan inovasi dalam model pemerintahan lokal. Hal ini melibatkan perubahan budaya di dalam organisasi pemerintah lokal, pengembangan kapasitas, dan pembangunan sistem yang mendukung inovasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana inovasi dapat digabungkan dalam konteks desentralisasi untuk membangun model pemerintahan lokal yang berkelanjutan. Kemampuan sumber daya juga menjadi penghambat pelaksanaan inovasi pemerintah. Inovasi Pembangunan desa yang memaksakan desa untuk mandiri sebagai sebuah keadaan yang tercipta dari adanya sikap kolektif masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Namun disisi lain, kemandirian desa belum dapat dilaksanakan karena kurangnya sumber daya yang memahami bagaimana Pembangunan desa dan keterbatasan sarana prasarana yang disediakan untuk Pembangunan desa. Namun pemerintah terus menuntut masyarakat desa pada setiap pembangunan yang ada, untuk dapat memberikan dampak yang baik bagi di setiap penjuru desa di Indonesia (Djahmiq & Salahudin, 2022). Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi pemerintah di Indonesia.

Keterlibatan masyarakat dalam menerapkan inovasi daerah masih kurang. Sebab, pemerintah belum cukup melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong implementasi inovasi daerah. Salah satu contohnya adalah inisiatif publikasi *Smart city* Kota Tangerang Selatan, yang didasarkan pada penggabungan teknologi ke dalam pemerintahan kota yang dimungkinkan oleh perkembangan *Internet Of Things* (IoT) (Wahid & Amalia, 2020). Dalam rangka meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat, integrasi teknologi berupaya untuk meningkatkan produktivitas, memberikan informasi kepada masyarakat umum, memberikan respons yang cepat, dan meningkatkan layanan masyarakat. Namun inisiatif-inisiatif tersebut belum menjadi yang terbaik karena pemahaman masyarakat Kota Tangerang Selatan terhadap gagasan *smart city* belum merata. Hal ini karena masyarakat pada umumnya belum ditangani melalui pendekatan humas, termasuk penggunaan media sosial. Fakta bahwa masyarakat umum di Kota Tangerang Selatan belum memiliki pengetahuan yang baik tentang konsep *Smart City* menunjukkan bahwa program pemanfaatan inovasi teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik belum sepenuhnya berhasil.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menggali hubungan antara desentralisasi pemerintahan dan inovasi dalam konteks pemerintahan lokal, serta untuk memberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang muncul dalam upaya membangun model pemerintahan yang berkelanjutan.

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal (Patarai, 2021). Untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dibangun pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi yang berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah, dalam banyak hal melewati provinsi. Mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru.

Inovasi adalah proses memanfaatkan sumber daya yang sudah ada untuk menciptakan keadaan baru yang lebih menguntungkan. Perubahan pasar dan industri, pergeseran populasi, ketidaksesuaian, kejadian tak terduga, dan pengetahuan baru dapat memberikan peluang munculnya inovasi. Informasi baru). Inovasi biasanya dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh inovator melalui berbagai tindakan dan studi yang disengaja. Proses menciptakan sesuatu yang baru dengan menggabungkan unsur-unsur yang sudah ada dikenal sebagai penemuan. Sementara itu, menemukan hal-hal baru, baik berupa konsep maupun instrumen, itulah yang dimaksud dengan penemuan. Menurut Everett M. Rogers (Rogers, 2003) inovasi adalah setiap konsep, ide, strategi, praktik, atau hal yang diakui sebagai hal baru dan disetujui oleh individu, kelompok/organisasi, badan/lembaga, atau lainnya untuk digunakan dalam implementasi atau adopsi. Sedangkan Stephen Robbins (dalam Batoebara, 2021), sebaliknya, mendefinisikan inovasi sebagai konsep segar yang diterapkan untuk meningkatkan suatu barang atau jasa. Stephen Robbins kini memiliki tiga bidang perhatian yang harus diperhatikan: produk, layanan, dan inisiatif peningkatan.

Menurut Bartos (dalam Sangkala, 2013), inovasi yang sesuai di sektor publik adalah modifikasi apa pun terhadap praktik atau kebijakan manajemen yang menghasilkan kemajuan terkini dalam kualitas, kuantitas, atau tingkat layanan keluaran organisasi. Implementasi konsep inovasi pemerintahan memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, konsep inovasi pemerintahan juga memerlukan kemampuan inovasi dari masing-masing lembaga pemerintah yang ditentukan oleh sejumlah faktor seperti visi dan strategi, penguatan informasi dan kecerdasan organisasi, orientasi pasar dan pelanggan, kreativitas dan manajemen gagasan, sistem dan struktur organisasi, dan manajemen teknologi (Asropi, 2008).

Model pemerintahan lokal yang berkelanjutan adalah konsep yang menekankan pentingnya mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup generasi masa depan (Afandi, 2021). Konsep ini mencakup beberapa prinsip dan strategi untuk menciptakan pemerintahan lokal yang berkelanjutan, kebutuhan wajar secara sosial dan kultural, menyebarkan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya.

Dalam implementasinya, konsep ini memerlukan model pemerintahan yang berkelanjutan dengan interaksi/kerjasama multi aktor yang kompleks antara elit politik lokal, industri (swasta) & masyarakat sipil, serta pada proses interaksi struktural kelembagaan melalui apa yang disebut kolaborasi tata kelola (Abdillah & Ahmadi, 2022). Konsep model pemerintahan lokal yang berkelanjutan didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah lokal memiliki peran kunci dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan berjalan seiring sejalan. Hal ini juga mencerminkan komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Agenda 2030 PBB.

METODE

Penelitian ini dibuat dengan tujuan menjelaskan menggali hubungan antara desentralisasi pemerintahan dan inovasi dalam konteks pemerintahan lokal, serta untuk memberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang muncul dalam upaya membangun model pemerintahan yang berkelanjutan. Penelitian ini disajikan menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif komparasi yang merupakan analisis yang membandingkan suatu kondisi yang sama untuk

menemukan kesamaan maupun perbedaan, menemukan sebab akibat dan faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena (Sugiono, 2012). Proses pengumpulan data diperoleh melalui data-data terkait desentralisasi dan inovasi pemerintahan lokal melalui data sekunder yang diperoleh dari situs resmi. Kemudian Pembahasan serta penyusunan dilakukan dengan pendekatan studi pustaka melalui *literature* jurnal ilmiah yang relevan atau melalui informasi *online*. Menurut Miles dan Michael (Miles & Michael, 1994) Analisis data akan di olah dalam 3 jalur Kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Desentralisasi dan Inovasi Pemerintahan dalam Konteks Pemerintahan Lokal yang berkelanjutan

Pemerintahan lokal yang berkelanjutan, desentralisasi dan inovasi pemerintahan harus diimplementasikan secara terintegrasi dan saling mendukung. Desentralisasi dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, sementara inovasi pemerintahan dapat membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Berbagai inisiatif dan sumber daya (termasuk ruang kerja bersama dan kompetisi data terbuka) diciptakan untuk mendorong keterlibatan publik dan upaya mempertahankan inovasi data terbuka (Safaria et al., 2019). Safaria dkk (Safaria et al., 2019) menjelaskan inovasi diupayakan melalui kolaborasi interaktif antara pengguna dan pemasok. Dengan cara ini, inovasi kolaboratif dapat didefinisikan sebagai pengembangan dan evolusi proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, aktor, dan personel kunci di dalam dan di luar organisasi, bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya kemajuan teknologi, inovasi, dan kebijakan.

Desentralisasi dan otonomi daerah hanya dapat dilaksanakan seefektif mungkin apabila komponen-komponen pemerintahan daerah sebagai suatu kesatuan pemerintahan terlebih dahulu diidentifikasi. Hal ini akan menjadi landasan bagi restrukturisasi, perubahan, dan perbaikan di masa depan berdasarkan dinamika kebutuhan saat ini. Urusan pemerintahan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, keterwakilan daerah, pelayanan publik, dan pengawasan merupakan tujuh komponen fundamental dengan terwujudnya demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat daerah akan dipengaruhi oleh penggunaan ketujuh komponen tersebut (Riyadi & Bratakusumah., 2005). Oleh karena itu, akan semakin dekat untuk mencapai tujuan otonomi itu sendiri jika kita terus meningkatkan atau menata ketujuh sifat penting tersebut. Disahkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan-peraturan yang dihasilkannya, yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengurus permasalahan daerah, merupakan perwujudan dari visi strategis tersebut di atas. Sejauh diketahui, UU Pemerintahan Daerah telah mengalami tiga kali revisi besar sejak reformasi hingga saat ini (UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya untuk mempertimbangkan dinamika perekonomian. mengubah kepentingan masyarakat.

Menurut Muflihah & Susanto serta Andhika (Andhika, 2018; Muflihah & Susanto, 2017), Infrastruktur, pengelolaan informasi, kualitas kepemimpinan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, dan lingkungan bisnis (swasta) merupakan beberapa elemen kunci yang mempengaruhi tumbuhnya inovasi pemerintah daerah. Selain itu, unsur masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan bisnis (swasta), kepemimpinan, infrastruktur jaringan informasi, dan pengelolaan informasi semuanya berdampak pada bagaimana e-Government berkembang di pemerintah daerah, khususnya di Indonesia

Timur (Wijaya et al., 2019). Dengan disahkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, e-Government telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2003. E-Government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik didefinisikan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 (SPBE). Teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh SPBE, sebuah instansi pemerintah, untuk memberikan layanan kepada penggunanya (Rozikin et al., 2020).

Inovasi pemerintahan yang berkelanjutan dapat muncul dari kerjasama antara pemerintah lokal dan masyarakat (Sumaryadi, 2005). Bentuk kolaborasi antara pemerintah lokal dan masyarakat dapat dilakukan dengan inovasi pemerintah dan non pemerintah. Dalam upaya melakukan inovasi pemerintah, hal ini dilakukan untuk memastikan perjalanan inovasi pemerintah dapat mencapai kesuksesan, maka pemerintah harus bekerja sama dan bersinergi. Dengan kendala yang dihadapi, pemerintah harus bekerja sama dan bekerja sama dengan pemain lain. Kekuatan kolaboratif telah menjadikan Bandung, Jawa Barat, kota kreatif, seperti yang ditunjukkan di seluruh kota. Peran komunitas dalam mencetuskan gerakan kreatif di Kota Bandung yang kemudian dibina pemerintah tidak bisa dipisahkan dengan Kota Kreatif Bandung (Kunariyanti & Yuwono, 2019). Model kolaborasi pentahelix merupakan pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan Kota Kreatif Bandung. Secara keseluruhan, penerapan Model Pentahelix untuk mengembangkan Bandung menjadi kota kreatif dianggap sebagai taktik untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Ketika seluruh peserta sadar akan tanggung jawabnya dan mau bekerja sama untuk menciptakan energi positif yang akan mendorong pertumbuhan Bandung sebagai creative hub, maka proses pengembangan dan pertumbuhan akan dimulai. Model pentahelix juga digunakan dalam mewujudkan smart village di Pondok Ranji kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang menghasilkan masyarakat atau community actor merupakan aktor utama dalam implementasi Smart Village Kecamatan Pondok Ranji. Namun, karena keterbatasan sumber dayanya, diperlukan peran aktor lain yang spesifik dan terorganisir. Jika Collaborative Government dengan model penta helix diterapkan, maka upaya Desa Pondok Ranji untuk mengembangkan smart village akan menjadi yang terbaik (Kelvin et al., 2022). pemerintah lokal dapat lebih mudah berkolaborasi dan bertukar pengalaman dengan pemerintah lokal lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar dari praktik terbaik dan inovasi yang telah diterapkan di tempat lain.

Desentralisasi sering kali memberikan pemerintah lokal akses yang lebih baik ke sumber daya lokal, termasuk sumber daya manusia, kekayaan alam, dan aset lokal lainnya. Dengan sumber daya ini, pemerintah lokal memiliki potensi untuk mengembangkan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, energi terbarukan, pariwisata, dan lainnya. Inovasi pemerintah lokal juga menimbulkan persaingan sehat antara pemerintah lokal dalam hal menarik investasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan iklim yang kondusif untuk inovasi. Persaingan ini dapat mendorong pemerintah lokal untuk lebih kreatif dalam mencari solusi yang efektif dan efisien. Hal ini dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan dalam mengembangkan *Science Techno Park*. Menurut *International Society of Science Park* (dalam Sari & Retnaningsih, 2020), *Science and Technopark* sebagai ide bisnis berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya merupakan tujuan dari formula atau konsep organisasi yang dikembangkan untuk sains dan technopark. memiliki hubungan operasional dengan institusi akademik dan pusat penelitian; struktur kepengurusannya aktif dalam alih teknologi; dan hal ini menciptakan kerangka kerja yang diperlukan bagi wirausahawan untuk meluncurkan dan mengembangkan bisnis mereka. kehadiran pelaku usaha, baik besar maupun baru, sebagai pelaku komersial untuk memenuhi permintaan konsumen.

Tantangan dan Peluang yang Muncul dalam Upaya Membangun Model Pemerintahan yang Berkelanjutan.

Dunia dengan perubahan teknologi dan sosial yang semakin cepat dan dengan keyakinan akan data yang ada di mana-mana dan realitas kelimpahan dalam jaringan, ketahanan data merupakan tantangan besar dalam payung keberlanjutan yang lebih luas. Membangun model pemerintahan yang berkelanjutan di tingkat lokal melibatkan sejumlah tantangan dan peluang. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini sambil memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di era digital, Pemerintah sosialisasi dan publikasi melalui sosial media, di antaranya Instagram, Youtube, facebook, Twitter, website. Pemerintah memanfaatkan website sebagai salah satu media sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga bekerja sama dengan media massa dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai pelaku adaptasi inovasi dalam perubahan yang dilakukan Sosialisasi dan publikasi mengenai program inovasi harus terbuka untuk bekerjasama dengan stakeholder, komunitas-komunitas, konsultan, akademisi dengan melakukan forum diskusi atau Focus Group Discussion (FGD)(Wahid & Amalia, 2020). Namun belum maksimal melakukan sosialisasi yang ditandai masih adanya masyarakat yang belum mengetahui Program inovasi (Kunariyanti & Yuwono, 2019). Sosialisasi berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan daerahnya. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu pembangunan desa guna mencapai tujuan pembangunan dan menjadikan sumber daya alam yang digunakan dalam pembangunan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jika partisipasi masyarakat tidak besar dalam pembangunan, maka hanya akan menimbulkan rasa tidak berguna karena sama saja dengan membuang seluruh potensi sumber daya alam dengan percuma. Masyarakat pedesaan di Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 300.000 megawatt, berdasarkan banyak sumber data. Namun, potensi energi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 3%, padahal potensi energi tersebut berdekatan dengan desa-desa di Indonesia, sehingga membuka peluang inovasi energi di setiap desa (Djahmiq & Salahudin, 2022).

Tantangan keberlanjutan saat ini memerlukan perubahan transformatif yang signifikan khususnya di sektor swasta didorong oleh bentuk-bentuk pemerintahan yang baru, yang mungkin juga lebih informal. Berbagai organisasi perantara yang berorientasi pada keberlanjutan mendorong dan mendukung dunia usaha agar berorientasi pada tujuan dalam mengatasi permasalahan keberlanjutan sosial dan lingkungan, selain memaksimalkan keuntungan (Dahlmann & Stubbs, 2023). Gagasan penyelarasan tujuan sistemik dan penyelarasan tujuan individu, penggunaan dua kerangka yang kontras namun saling melengkapi secara bersamaan memungkinkan perantara untuk menarik dan berpotensi melibatkan berbagai khalayak dalam upaya mereka mengubah dunia usaha dan sistem ekonomi. Dalam konteks ini, penyusunan tujuan di sektor swasta menyerupai pendekatan tata kelola informal dalam memulai transformasi sistem. Bukan hanya menetapkan aturan, praktik, dan proses formal yang jelas, konsep tujuan yang cukup ambigu memungkinkan para perantara ini untuk menerapkan dua kerangka konseptual yang berbeda secara bersamaan dan dengan demikian menarik beragam aktor dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian Jarvenpa dan Essén (Jarvenpaa & Essén, 2023) menjelaskan pentingnya keberlanjutan data dalam infrastruktur data yang ditujukan untuk penemuan pengetahuan jangka panjang. Keberlanjutan data mengacu pada kapasitas data untuk bertahan di seluruh generasi teknologi dan manusia, dan hal ini mempermasalahkan literatur tata kelola data dari perspektif temporal. Lingkungan organisasi ke lingkungan antarorganisasi yang lebih kompleks, menyoroti kesenjangan

antara model tata kelola data normatif dan praktik organisasi. Keberlanjutan data di seluruh generasi teknologi dan manusia menavigasi tuntutan-tuntutan temporal yang saling melengkapi dan bersaing: Data perlu mengalami transisi antar rezim sosio-teknis dari waktu ke waktu, namun tetap tertanam dalam jaringan sosial dan material agar bermakna; data historis dan terkini juga harus tetap tersedia dan dapat diakses dalam waktu dekat dan jauh di masa depan, untuk kembali ke masa lalu dan melihat keterkaitan dan kombinasi data baru. Kami berpendapat bahwa keberlanjutan data sangat penting dalam memastikan kemajuan dalam keberlanjutan sosial dan lingkungan. Perspektif mengenai keberlanjutan data dan menawarkan wawasan tentang tantangan keberlanjutan yang terlihat dari perspektif ini secara individual, serta ketika satu perspektif mempengaruhi perspektif lainnya. Jarvenpa dan Essén (Jarvenpaa & Essén, 2023) berpendapat bahwa kemajuan teknologi tanpa keberlanjutan data tidak akan membawa masa depan yang berkelanjutan. Bidang-bidang penelitian di masa depan yang dijabarkan memberikan banyak peluang ke depan dalam bidang keilmuan tentang tata kelola data dan keberlanjutan.

Pada penelitian Ponte dkk (Ponte et al., 2023), Instrumen tata kelola swasta dan publik yang berupaya memastikan keberlanjutan rantai nilai pertanian pangan telah tersebar luas dalam tiga dekade terakhir. Semua pengecer besar, pengolah pangan hasil pertanian, dan pedagang komoditas internasional telah terlibat dalam satu atau lain inisiatif keberlanjutan atau keterlibatan multipihak. Literatur kritis yang muncul menunjukkan bahwa pencapaian tujuan keberlanjutan di sepanjang rantai nilai sering kali mengorbankan profitabilitas di tingkat produksi. Meskipun ada harapan yang diberikan pada standar keberlanjutan yang didorong oleh negara-negara Selatan agar dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan konteks lokal, namun rekam jejak mereka dalam melakukan hal tersebut masih beragam. Dalam artikel ini, kami mengkaji bagaimana berbagai jenis tata kelola keberlanjutan mempengaruhi kesenjangan di dalam dan di sepanjang rantai nilai anggur Afrika Selatan. Tata kelola keberlanjutan tidak memberikan hasil bagi banyak petani anggur dan produsen anggur di Afrika Selatan, juga tidak mendukung masuknya dan kepemilikan orang-orang yang secara historis kurang beruntung (HDP) – meskipun pemerintah telah menyatakan tujuan transformasinya. Kami menyimpulkan bahwa tata kelola keberlanjutan mendukung kesenjangan yang ada dan mempertanyakan kemampuan inisiatif yang ada saat ini untuk membentuk rantai nilai yang lebih adil, merata, dan ramah lingkungan. Kami juga berpendapat bahwa setiap diskusi di masa depan mengenai keberlanjutan dan tata kelolanya dalam rantai nilai global juga harus menjadi diskusi mengenai kesenjangan.

Industri anggur Afrika Selatan memandang dirinya sebagai pionir keberlanjutan dalam rantai nilai global (Sudarsono, 2020). Kumpulan inisiatif dan peraturan independen yang kompleks telah dirancang di dalam negeri sejak akhir tahun 1990an, yang diduga ‘berorientasi ke Selatan’ dan diharapkan lebih sesuai dengan realitas dan konteks lokal dibandingkan dengan standar global. Penelitian ini membedakan antara inisiatif keberlanjutan yang didorong oleh asosiasi industri dalam negeri, kelompok masyarakat sipil dan/atau pemerintah (tata kelola keberlanjutan horizontal) dan inisiatif yang dilakukan secara proaktif oleh masing-masing pemasok (tata kelola vertikal dari bawah ke atas) dan mengkaji bagaimana inisiatif tersebut berinteraksi dengan strategi yang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka global (tata kelola vertikal *top-down*). Melonjaknya biaya operasional dan tuntutan vertikal atas-bawah terhadap keberlanjutan memberikan tekanan tambahan pada margin (Mayasari et al., 2022). Potensi fitur penghematan biaya yang dapat dimanfaatkan oleh produsen dalam jangka panjang memerlukan biaya investasi di muka pada saat tingkat suku bunga tinggi dan profitabilitas rendah (Wijayanti, 2020). Akibatnya, banyak petani anggur yang menjual aset

mereka atau beralih ke tanaman lain, dan banyak pembuatan anggur serta operasi terpadu yang diambil dengan harga diskon oleh modal asing.

SIMPULAN

Desentralisasi pemerintahan dapat menjadi faktor penting dalam upaya membangun pemerintahan lokal yang berkelanjutan. Desentralisasi memberikan pemerintah lokal lebih banyak otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan, yang memungkinkan mereka untuk merancang inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan. Tantangan-tantangan dalam pembangunan pemerintahan lokal yang berkelanjutan melibatkan keterbatasan sumber daya keuangan, perubahan iklim, keterbatasan kapasitas, masalah sosial dan ekonomi, serta ketidakstabilan politik. Namun, terdapat peluang besar untuk mengatasi tantangan ini melalui partisipasi masyarakat yang aktif, kerjasama dan kemitraan, teknologi dan inovasi, pembiayaan berkelanjutan, ketahanan lingkungan dan sosial, pendekatan multisektor, serta peningkatan pengetahuan dan pembelajaran. Secara keseluruhan, desentralisasi dan inovasi pemerintah adalah alat penting dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang ada, pemerintah lokal dapat memainkan peran yang krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan berdaya tahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, & Ahmadi, Z. (2022). Tata Kelola Berkelanjutan: Studi Tentang Idealitas Model Tata Kelola Daerah Sulawesi Selatan, Indonesia. *Journal Of Government Studies*, 2(2), 106–119.
- Afandi, M. N. (2021). *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan Atau Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Deepublish Publisher.
- Andhika, L. R. (2018). Elemen Dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(03), 207–222. <https://doi.org/10.35450/jip.v6i03.112>.
- Asropi. (2008). Budaya Inovasi Dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 5, No 3 (2008)*, 10, 265–275.
- Azis, R. F. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Dan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018-2020. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 9(03), 241.
- Batoebara, M. U. (2021). Inovasi Dan Kolaborasi Dalam Era Komunikasi Digital. *Jurnal Prosiding*, 1, 21–29.
- Dahlmann, F., & Stubbs, W. (2023). Purpose Framing As An Informal Governance Approach To Sustainability Transformations In The Private Sector. *Earth System Governance*, 15(June 2022), 100165. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2023.100165>
- Digidesa.Id. (2022). *Inilah Pentingnya Inovasi Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Desa*. Transformasi Digital Desa.
- Djahmiq, N. I., & Salahudin, S. (2022). Analisis Tantangan Dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.13486>
- Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). *Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas: Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World*. Lppm Press Upn" Veteran" Yogyakarta.
- Jarvenpaa, S. L., & Essén, A. (2023). Data Sustainability: Data Governance In Data Infrastructures Across Technological And Human Generations. *Information And Organization*, 33(1). <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2023.100449>
- Kelvin, Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. *J-3p (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(November), 1–15. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2587>
- Kunariyanti, D., & Yuwono, T. (2019). Inovasi Pemerintah Daerah Berbasis Kolaborasi, Bandung Creative City. *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(04), 231.
- Mayasari, N., Cholisoh, N., Armunanto, A., Hardika, I. R., Prameswari, Y., Widarnandana, I. G. D.,

- Putra, I. D. M. A. P., Satar, M., Kurniawan, R., & Susanti, L. (2022). *Perilaku Organisasi*. Tohar Media.
- Miless, M. B., & Michael, A. H. (1994). *Analisis Data Kualitatif*. Ui Press.
- Muflihah, Y., & Susanto, T. D. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Warga Dan Pemerintah Dalam Adopsi E-Government: Sebuah Ulasan Sistematis. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(4), 304–310. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201744366>
- Patarai, M. I. (2021). Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406–1417. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.V1i11.237>
- Ponte, S., Das Nair, R., & Chisoro, S. (2023). Is Sustainability Governance Abetting Inequality? Reflections From The South African Wine Value Chain. *Geoforum*, 147(August), 103877. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103877>
- Riyadi, & Bratakusumah., D. S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion Of Innovations*. The Free Press.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi Dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80. <https://doi.org/10.24258/jba.V16i1.603>
- Safaria, A. F., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Irawati, I. (2019). Model Inovasi Kolaboratif Dalam Implementasi Program Open Data: Tantangan Dan Manfaatnya Bagi Publik. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jap.V9i1.2150>
- Sangkala. (2013). *Innovative Governance: Konsep Dan Aplikasi*. Capiya Publishing.
- Saragih, J. P. (2016). Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 5(2).
- Sari, N. M., & Retnaningsih, E. (2020). Strategi Pengembangan Science Techno Park Melalui Ekosistem Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan Techno Science Park Development Strategy Through The Ecosystem Of Innovation In The Context Of Enhancing Competitiveness. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 3(1), 1–20.
- Sudarsono, H. (2020). *Manajemen Pemasaran*. Pustaka Abadi.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Cv Citra Utama.
- Wahid, U., & Amalia, N. (2020). Tantangan Humas Pemerintah Daerah Dalam Upaya Publikasi Inovasi Program Smart City. *Nyimak: Journal Of Communication*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.31000/nyimak.V4i1.2300>
-

Wijaya, A. A. M., Sa'ban, L. A., & Mayunita, Dan S. (2019). Collaborative Governance To Evolve Smart City In Local Governments. *Proceeding Icojiss*, 34(4), 853–866.

Wijayanti, M. (2020). *Pengaruh Manajemen Aset, Strategi Finansial, Dan Efektivitas Piutang Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)*. Universitasmuhammadiyahsemarang.

Zulkifli. (2020). Pengaruh Inovasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Kualitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 68–89.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).